BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah pernikahan yang kekal. Asas kekekalan dalam pernikahan menunjukkan keistimewaan akad pernikahan dibanding akad-akad yang lain. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dari suatu pernikahan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut.

Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.¹

Tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang.

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.” Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini orang tua kedua belah pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertakan dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun hendaknya melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.²

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan islam analisis UU no.1 tahun 1974 dengan kompilasi Hukum islam*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm.183.

Dispensasi Perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Adapun usia yang ditetapkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni untuk perempuan dan untuk laki-laki minimal 19 tahun. Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Mojokerto, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto, terdapat sebagian diantara mengajukan perkara dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Mojokerto.

Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode masalah mursalah dan sadz adz-dzariah.³ Penulis memilih PA Mojokerto dikarenakan di wilayah Kabupaten Mojokerto masih sering terjadi pernikahan dibawah umur, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk. Di Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2017 ada 111 perkara dispensasi nikah, tahun 2018 103 perkara dispensasi nikah, serta di tahun 2019 dari bulan Januari sampai Desember mencatat ada 81 perkara yang mengajukan dispensasi nikah dan sudah diputus. Menurut Panitera Muda Gugatan PA Mojokerto alasan banyaknya pengajuan dispensasi nikah dikarenakan dampak

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 53.

dari pergaulan bebas yakni melakukan hubungan seksual serta hamil di luar nikah.⁴

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi kawin?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna memahami dan mengetahui pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Guna memahami dan mengetahui faktor yang menyebabkan pasangan muda mengajukan permohonan dispensasi kawin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di Fakultas Hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

⁴ Pemohon Dispensasi Menikah di Mojokerto Masih Tinggi, <http://jatim.sindonews.com/read/13861/1/pemohon-dispensasi-menikah-di-mojokerto-masih-tinggi-1566533284>, diakses pada hari Sabtu, 04 Januari 2020 pukul 07.00.

2. Praktis
 - a. Bagi Pengadilan Agama Mojokerto, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan pelaksanaan dispensasi kawin.
 - b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah serta dapat memahami makna pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama Islam.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah fiqih diambil dari kata ‘nikah’ atau ‘*zawaj*’ yang berasal dari bahasa Arab, dilihat secara makna etimologi (bahasa) berarti ‘berkumpul dan mendidih’, atau dengan ungkapan lain bermakna ‘akad dan setubuh’ yang secara syara’ berarti akad pernikahan.⁵ *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath’I*, *al-Dhommuh*, *al-Tadakhul*, *al-Jam’u* atau ibarat ‘*an al-wath wa al aqd*’ yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima’, dan akad.⁶

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita

⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mahzab*, Prima Heza Bestari, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau ketuhana yang maha esa.⁷

Adapun rumusan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian rumusan lain yang tidak mengurangi arti pengertian Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan

⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukumu Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm.183.

melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama, dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.

1.5.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Di samping itu secara rinci tujuan pernikahan juga meliputi beberapa hal berikut ini :

- a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah akad nikah. Nafsu seks merupakan merupakan nafsu paling kuat pada diri manusia ia menuntut penyaluan.
- b. Membentengi Akhlak yang luhur
Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.
- c. Menegakkan Rumah Tangga Islami
Dalam Alqu'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah.
- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah
Menurut konsep Islam hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 288. (Selanjutnya disingkat Sudarsono I)

manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal- amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

e. Memperoleh Keturunan yang Shalih

Tujuan Pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan shalih untuk melestarikan dan mengembangkan bani adam.⁹ Selain itu, tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan – tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Memelihara gen manusia. Penikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak – hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran –pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusi menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.¹⁰

1.5.1.3 Prinsip dan Asas Perkawinan

Prinsip – prinsip Perkawinan yang diatur dalam agama

Islam menurut Hukum Islam yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Dengan cara dilakukan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui kedua belah pihak setuju atau tidak.
- b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan ketetapan tentang larangan perkawinan antara perempuan dan pria yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

⁹ Abdul Aziz, *Buku dasar Fiqh Munakahat*, Fakultas Syariah, Surakarta, 2014, hlm. 73.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 39.

- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.¹¹

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan prinsip-prinsip atau asas perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umumnya yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, dan dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hal itu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka Undang-Undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

¹¹ Syaikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Jilid III*, Pustaka Imam As-Syafi'i, Jakarta, 2002, h. 6.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹²

Dari uraian prinsip dan asas dalam perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang perkawinan dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

1.5.1.4 Syarat dan Rukun Perkawinan

1.5.1.4.1 Syarat Perkawinan

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

¹²Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 10.

- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) atau salah seorang tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan dapat memberi izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut.
- (6) Ketentuan tersebut berlaku sepanjang masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meliputi:

1. Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan orang tua calon mempelai yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) berlakujuga ketentuan mengenai permintaan dispensasi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ayat (6).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu:

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus

diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:

- a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
 - b. Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);
 - c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);
 - d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengiddahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
 - e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata).
2. Syarat materiil relative, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:
- a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan;

- b. Larangan kawin karena zina;
- c. Larangan kawin untuk memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat Formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.¹³Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

1. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinanya, apabila terjadi percekocokan atau perselisihan diantara mereka, atau salah tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing – masing.

Pencatatan memiliki manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat – syarat perkawinan baik menurut hukum agama dan

¹³Sudikno, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 29.

kepercayaan itu maupun menurut perundangan – perundangan. Dalam bentuk konkret penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP no. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan :

- a. Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan;
- b. Pemberitahuan ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan).
- c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama kepala daerah.¹⁴

2. Akta Nikah

Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum “ apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dilakukan apabila perkawinan itu tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

1.5.1.4.2 Rukun Perkawinan

¹⁴ Sudarsono I, *Op. Cit*, hlm .317.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuhmuka untuk wudu dan takbirotul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

Adapun rukun nikah adalah :¹⁵

1. Mempelai laki-laki.
 - a. Beragama Islam; maksudnya calon suami adalah muslim, bukan kafir atau non muslim lainnya. Sebab Islam melarang seorang muslim menikah dengan seorang non muslim.
 - b. Benar benar laki-laki; maksudnya seorang calon suami harus betul laki-laki, bukan banci atau mempunyai kelainanseksual, seperti homo (suka dengan sesama lelaki), sehingga nantinya dapat bertanggung jawab memenuhi hak-hak isterinya.
 - c. Tidak terpaksa; maksudnya calon suami dalam menikah adalah kehendaknya pribadi dan penuh kerelaan hati, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Serta dilandasi keikhlasan hanya mengharap ridha Allah SWT. Apabila suami menikah karena terpaksa, niscaya pernikahannya secara otomatis tidak sah.
 - d. Bukan mahram calon istri; maksudnya calon suami yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempunyai hubungan darah atau satu susuan dengan calon istri. Untuk itu, sebelum melangsungkan pernikahan alangkah baiknya calon suami mengecek terlebih dahulu apakah dirinya mempunyai hubungan darah dengan calon istrinya atau tidak. Jika mempunyai hubungan darah pernikahannya harus dibatalkan. Akan tetapi bila tidak ada hubungan darah, pernikahannya boleh dan siap untuk dilaksanakan. Itulah yang diajarkan dalam al Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 12.

- e. Tidak sedang ihram; maksudnya calon suami tidak boleh melaksanakan pernikahan, jika ia sedang melakukan ihram, baik itu ihram haji maupun umrah. Karena dalam Islam melarang orang yang sedang ihram itu menikah. Sebagaimana sabda Rosullah SAW telah bersabda: "orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan".(HR.Muslim)
- f. Keberadaanya jelas dan nyata; maksudnya calon suami benar benar nyata dan jelas keberadaanya, sehingga pernikahan dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.

2. Mempelai perempuan.

- a. Beragama Islam; maksudnya calon istri adalah muslimah, bukan dari non Islam. Karena Islam melarang pernikahan yang berbeda agama dan tidak seiman.
- b. Benar-benar perempuan; maksudnya seorang calon istri harus benar benar perempuan, bukan banci atau lesbian sehingga nanti dapat bertanggung jawab sebagai seorang istri untuk memenuhi hak-hak suami.
- c. Tidak karena terpaksa; Maksudnya calon istri dalam melangsungkan pernikahan tidak karena terpaksa, tetapi kehendak hati dan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT.
- d. Halal bagi calon suami; maksudnya calon isteri bukan mahram dari calon suami, baik hubungan darah maupun satu susuan.
- e. Tidak bersuami; maksudnya calon isteri adalah masih seorang diri, baik itu janda maupun perawan. Wanita yang masih mempunyai seseorang suami tidak boleh menikah lagi kecuali bercerai atau meninggal dunia.
- f. Tidak sedang ihram; maksudnya calon isteri dalam melangsungkan pernikahan tidak sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah.

3. Wali.

Wali mempelai perempuan adalah orang tua yang berhak untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Wali bertugas menyatakan Ijab kepada calon mempelai laki-laki pada saat pernikahan berlangsung. Tanpa adanya seorang wali mempelai perempuan, maka pernikahannya dianggap batal atau tidak sah. Untuk

menjadi wali mempelai perempuan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu :

- a. Laki-laki; maksudnya yang diperbolehkan menjadi wali mempelai perempuan pada saat pernikahan ialah harus berjenis kelamin laki-laki, sebab yang menjadi rumah tangga adalah laki-laki. Namun apabila perempuan yang akan menikah adalah janda, ia dapat menjadi walinya diri sendiri. Berikut adalah urutan yang berhak menjadi wali perempuan:
 - 1) Bapak kandung;
 - 2) Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai keatas;
 - 3) Saudara laki-laki kandung (seibu-sebapak);
 - 4) Saudara laki-laki sebapak;
 - 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
 - 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah;
 - 7) Paman (saudra dari bapak) sekandung;
 - 8) Paman (saudara dari bapak) sebapak;
 - 9) Anak laki-laki paman kandung;
 - 10) Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya kebawah;
 - 11) Wali hakim (apabila semua yang tersebut diatas tidak ada atau tidak mampu menikahkan);
- b. Beragama Islam; Maksudnya adalah menjadi wali dari calon mempelai perempuan haruslah yang beragama Islam.
 - 1) Baligh; Maksudnya seorang wali haruslah yang sudah dewasa, kira-kira usianya telah mencapai lima belas tahun. Hal ini dikarenakan anak belum mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum pernikahan;
 - 2) Berkal Sehat; Maksudnya seorang wali haruslah mempunyai akal sehat, bukan orang stres atau gila;
 - 3) Merdeka; maksudnya wali mempelai perempuan yang bersangkutan tidak sedang dipenjara atau tidak memungkinkan hadir dalam pernikahan.;
 - 4) Adil; maksudnya seorang yang senantiasa dapat menentramkan jiwa keluarga dan orang yang di urusnya. Manakala kelakuannya sudah melampaui batas syariat sehingga tidak bisa lagi menentramkan jiwa keluarganya, maka demikian gugurlah haknya menjadi wali pernikahan;
 - 5) Tidak sedang Ihram; maksudnya seorang wali dalam pernikahan tidak sedang melakukan ihram

haji ataupun umrah.

4. Dua orang saksi.

Saksi dalam suatu pernikahan sangatlah penting. Saksi merupakan rukun terakhir dalam pernikahan. Tanpa adanya saksi pernikahan di anggap batal atau tidak sah. Sebagaimana sabda Rosullah SAW bersabda “ tidak sah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil “ (HR. Ahmad). Dalam Islam menjadi wali saksi harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut : beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil dan tidak sedang ihram. Apabila telah memenuhi syarat syarat tersebut, seorang sudah di benarkan menjadi saksi dalam pernikahan.

5. Shigat ijab kabul.

Ijab Qabul merupakan bentuk dari akad serah terima dalam pernikahan. Ijab Qabul ini dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Ijab Qabul ini merupakan bentuk kerelaan dan persetujuan untukmembentuk suami isteri antara kedua calon mempelai. Ijab Qabul adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh orang tua atau wali perempuan untuk menerima atau menyetujui pernikahan tersebut.

1.5.1.5 Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

1. Nikah Hukumnya Wajib.

Nikah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan menikah.¹⁶

¹⁶*Ibid*, hlm. 8.

2. Nikah Hukumnya Sunnah.

Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan tidak berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.¹⁷ Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an dalam surat An Nur ayat 32.

3. Nikah Hukumnya Haram.

Menikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.¹⁸ Sedangkan pernikahan yang diharamkan, yaitu:¹⁹

- a. Nikah Mut'ah yaitu: Pernikahan yang biasanya untuk masa tertentu, pernikahan terputus atau berakhir tanpa adanya proses perceraian.
- b. Nikah Tahlil yaitu: Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.
- c. Nikah Syighar, yaitu : Nikah dengan sejumlah kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya.

4. Nikah Hukumnya Makruh.

Menikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik.²⁰

5. Nikah Hukumnya Mubah.

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya khawatir akan berbuat zina adan apabila melakukannya juga akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pranada Media, Jakarta, 2007, hlm. 99.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 21.

pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²¹

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

1.5.2.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang-undang. Dan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah suatu penetapan yang bersifat deklaratif, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagai diajukan oleh seorang pemohon.²²

Yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

1.5.2.2 Syarat-Syarat Dispensasi Kawin

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia cetakan 5*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 47.

²² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu Cetakan II*, Surya Multi Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 52.

1. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

2. Persyaratan Dispensasi Nikah menurut Permenag Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13 ayat (2) .

a. Surat Permohonan.

b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp6.000,- di Kantor Pos.

c. Surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.

d. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.

e. Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).

f. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

2.2.3 Batas Usia Minimal Kawin dalam Hukum Islam dan Hukum

Positif

1. Ketentuan Batas Usia Minimum untuk Menikah dalam Hukum Islam.

Islam dalam hal ini al-Qur'an dan Hadist tidak menentukan batas minimal umur untuk kawin. Para ulama mazhab pada umumnya dahulu membolehkan seorang bapak menjadi 'wali mujbir' mengawinkan anaknya lelaki atau perempuan yang gadis dan masih dibawah umur tanpa harus meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad mengawini Aisyah r.a pada waktu usia 7 dan mulai berumah tangga pada usia 9. Peristiwa ini terjadi lebih kurang 14 abad yang lalu dan tidak ada keterangan yang otentik dari Nabi Muhammad bahwa perkawinannya dengan Aisyah itu termasuk tindakan yang khusus untuk Nabi, maka fakta atau kejadian tersebut lalu dijadikan dalil oleh para ulama mazhab tentang boleh sah nya perkawinan anak-anak.

Rasulullah pun menganjurkan umatnya terutama bagi para pemuda untuk segera kawin apabila segala sesuatunya sudah memungkinkan. Dan berpuasa menjadi solusi bagi para pemuda yang belum mampu kawin.

Didalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig, oleh karena itu seorang pria yang

belum balig belum bisa melaksanakan qobul secara sah dalam suatu akad nikah.²³

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.²⁴

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal

²³ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm. 26.

²⁴ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta, 1998, hlm. 352.

ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Safinatun Najah, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia 9 tahun.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari

banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

2. Ketentuan Batas Usia Minimum untuk Menikah dalam Hukum Positif

Pada umumnya Negara-negara di dunia ini mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal untuk kawin bagi warga negaranya. Indonesia dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Pasal 7 ayat (1) ini erat sekali hubungannya dengan Pasal 6 ayat (2) yang menerangkan bahwa :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami

isteri yang masih di bawah umur.²⁵

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang rumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.²⁶

Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal itu, maka undang - undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang - undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) menyatakan:

²⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional cet. III*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 7. (Selanjutnya disingkat Sudarsono II).

²⁶ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 17.

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup”.

Dalam hal ini Undang –Undang perkawinan tidak konsisten di satu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun yang diperlukan ijin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun perlu izin pengadilan.²⁷ Ini dikuatkan lagi pasal 15 ayat (2) kompilasi hukum islam “ bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang –Undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

1.5.2.4 Landasan Hukum Dispensasi Kawin

Adapun ketentuan landasan hukum dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi wanita, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang dispensasi perkawinan dalam Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini orang tua pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan harus mendengarkan

²⁷ Sudarsono I, *Op. Cit*, hlm. 290.

pendapat kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁸

Begitu pula Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang dispensasi perkawinan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu; Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.²⁹ Kemudian ayat 2 juga menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. KUH Perdata Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 331.

²⁹ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 10.

KUHPerdata Pasal 330 adalah umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Namun berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, Peneliti memilih menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris karena dalam pendekatan ini bukan hanya mengumpulkan data tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang mendalam. Di samping itu pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturanperundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian ataupun pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan Agama.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim,³¹ yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 105.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 141

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi, disini penulis menggunakan sumber sekunder sebagai berikut, yakni:

1. Buku mengenai Hukum Perkawinan
 2. Buku mengenai Hukum Dispensasi Kawin
 3. Jurnal mengenai Perkawinan
 4. Jurnal mengenai Dispensasi Kawin
 5. Wawancara
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³²

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

³² Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 12

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya tingkat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³³

1.6.5 Sistematika Penulisan

Proposal ini merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Proposal ini ditulis secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut.

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan. Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam proposal ini. Dalam bab 1 ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana tinjauan pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan teori-teori untuk

³³ Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.107

mendukung pembahasan dalam proposal ini, metodologi penelitian dimana yang digunakan untuk membahas proposal ini yaitu metodologi yuridis empiris.

Bab *Kedua* merupakan pembahasan tentang perumusan masalah yang pertama mengenai pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, sub bab kedua membahas tentang analisis pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

Bab *Ketiga* membahas tentang perumusan masalah yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pasangan dibawah umur mengajukan dispensasi kawin.

Bab *Keempat* merupakan bab penutup terdiri atas ringkasan dari seluruh uraian / kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan yang dianjurkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (Lima) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus minggu keempat yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal,

selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan agama Mojokerto yang beralamat di Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17, Kota Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61326.